

# **Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan**

(Erna Setijanigrum, SIP, MSi, Dra. Rochyati Wahyuni Triana, MSi)

## **ABSTRAK**

Berdasarkan data Badan Bapemas bahwa pada tahun 2011 kemiskinan di Surabaya masih tergolong tinggi. Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Semampir, kecamatan Tambaksari, dan kecamatan Simokerto. Sebenarnya sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait sehubungan penanggulangan kemiskinan. Namun berbagai program tersebut seringkali *overlapping*, tidak terkoordinasi, dan hanya berdasar project semata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membuat desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat miskin untuk hidup layak di perkotaan. Selama ini, untuk menanggulangi masalah kemiskinan terdapat delapan instansi yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), (2) Bapemas dan KB, (3) Dinas Koperasi dan UMKM, (4) Disperindag, (5) Dinas Kesehatan, (6) Dinas Tenaga Kerja, (7) Dinas Sosial, (8) Dispendik. Semua instansi dalam menjalankan programnya selalu memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Namun keterkaitan ini tidak selalu diikuti dengan adanya koordinasi antara instansi tersebut. Bahkan ada beberapa program yang *overlapping* satu dengan yang lain. Untuk mendesain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat miskin, terdapat sepuluh instansi terkait yaitu (1) Bappeko, (2) Dinas Pendidikan, (3) Dinas Sosial, (4) Dinas Tenaga Kerja, (5) Dinas Kesehatan, (6) Bapemas dan KB, (7) Cipta Karya, (8) PDAM, (9) Kecamatan dan Kelurahan, (10) Catatan Sipil dan Kependudukan

### **A. Pendahuluan**

Di tengah maraknya pembangunan di Surabaya, ternyata kota ini masih belum mampu menghapus kemiskinan. Meski setiap tahun anggaran pengentasan kemiskinan mencapai puluhan miliar rupiah, angka kemiskinan di Surabaya terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya 2011, jumlah keluarga miskin (Gakin) tercatat sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (dengan asumsi bahwa 1 KK terdiri dari empat jiwa)

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Semampir, kecamatan Tambaksari, dan kecamatan Simokerto. Berikut,

data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1 :  
Prosentase Keluarga Miskin di Kecamatan Semampir  
Tahun 2011

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase ( % )
1	Ampel	5.333	906	6,33
2	Sidotopo	8.271	4.937	13,21
3	Pegirian	6.610	3.561	10,17
4	Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
5	Ujung	7.485	5.176	12,60
Jumlah		39.943	20.467	60,41

Sumber : BPS Jatim 2012 : Kecamatan dalam angka

Total prosentase keluarga miskin di kecamatan Semampir adalah sebesar 60.41%. Keluarga miskin terbesar di kelurahan Wonokusumo, Sidotopo, Ujung, Pegirian, dan Ampel

Tabel 2 :  
Prosentase Keluarga Miskin di Kecamatan Tambaksari  
Tahun 2011

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase ( % )
1	Pacarkeling	7.559	1.537	20.33
2	Pacar Kembang	9.469	1.701	17.96
3	Ploso	6.376	2.016	31.62
4	Tambaksari	3.940	1.142	28.98
5	Rangkah	3.863	1.080	27.96
6	Gading	24.357	3.037	12.47
Jumlah		55.564	10.513	18.92

Sumber : BPS Jatim 2012 : Kecamatan dalam angka

Total prosentase keluarga miskin di kecamatan Tambaksari adalah sebesar 18.92%. Keluarga miskin terbesar di kelurahan Tambaksari adalah kelurahan Ploso, Tambaksari, Rangkah, Pacarkeling, Pacar Kembang, dan Gading

Tabel 3 :  
 Prosentase Keluarga Miskin di Kecamatan Simokerto  
 Tahun 2011

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase ( % )
1	Kapasan	16.980	692	4.07
2	Tambak Rejo	17.668	1.552	8.78
3	Simokerto	23.822	1.752	7.35
4	Sidodadi	16.080	1.682	10.46
5	Simolawang	22.108	2.468	11.16
Jumlah		96.658	8.146	41.82

Sumber : BPS Jatim 2012 : Kecamatan dalam angka

Total prosentase keluarga miskin di kecamatan Simokerto adalah sebesar 41.82%. Keluarga miskin terbesar di kecamatan Simokerto adalah kelurahan Simolawang, Sidodadi, Tambak Rejo, Simokerto, dan Kapasan

Kemiskinan di Surabaya telah menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks antara lain masalah pengangguran, masalah sosial seperti kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan, gizi buruk, serta permasalahan tempat tinggal dan lingkungan yang kumuh dan lain-lain yang semuanya akan menjadi beban pemerintah kota Surabaya.

Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) untuk bidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Masih ada pula program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah propinsi seperti Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardutaskin) , Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), yang kemudian diganti dengan program Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES). Bahkan, satu keluarga miskin bisa mendapatkan beberapa jenis program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah tersebut. Selain itu, masih ada program khusus yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya antara lain program

jaminan kesehatan masyarakat bagi kelompok miskin non kuota pemerintah pusat, Pelatihan dan Bantuan Kredit Modal, Program pelatihan tenaga kerja, dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Meskipun Pemkot Surabaya telah banyak melaksanakan berbagai program penanganan masalah kemiskinan, namun terbukti bahwa berbagai program tersebut masih belum bisa mengatasi masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan terlihat masih belum efektif lebih dikarenakan berbagai program kemiskinan yang dikerjakan oleh banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Bapemas, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) memiliki program sendiri - sendiri. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan tersebut tidak tefokus dan berlangsung tanpa arah yang jelas. Banyak sekali program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih / *overlapping*, dan tidak saling menunjang. Salah satu contoh, Disperindag, Dinas Koperasi, dan Dinas Sosial sama-sama memberikan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok miskin. Program ini tidak saling terkoordinasi satu sama lain, sehingga hasilnya tidak efektif untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Selain itu, berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD tersebut hanya berorientasi pada project, tanpa mendasarkan pada kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Sebagai contoh, pemberian modal kepada kelompok miskin yang baru merintis usahanya, merupakan program yang hanya berdasar project semata. Karena bila ditelaah lebih jauh sebenarnya kebutuhan kelompok miskin yang baru merintis usahanya bukanlah semata-mata kekurangan modal, namun lebih pada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan jaringan pemasaran.

Dengan demikian, setidaknya ada dua penyebab tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan, yaitu pertama, tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, kedua, program hanya berdasar pada project tanpa memperhatikan pada kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Oleh karena itu, agar kemiskinan di perkotaan bisa ditanggulangi, maka diperlukan suatu desain program yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengubah orientasi program yang berdasar pada project menjadi program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin perkotaan.



## B. Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan

Belum ada kata sepakat tentang definisi kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh definisi berikut. Salah satu definisi yang sering dipakai untuk menggambarkan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang baik yang mencakup material maupun non material (Reitsma dan Kleinpenning, 1985). Di Indonesia, definisi tersebut pernah dinyatakan sebagai "*the inability of individual to meet his basic needs*" (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Definisi seperti ini memberi peluang terhadap interpretasi yang bisa tidak tepat karena ketidakmampuan tersebut biasanya diukur dalam bentuk "uang", dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya matapencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Apalagi konsep kebutuhan dasar nampaknya juga masih belum dapat diterima secara umum karena tidak hanya berbeda antar individu yang satu dengan yang lain, tetapi juga berbeda antar ruang dan waktu.

Adapun dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang disusun oleh Bappenas dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) kemiskinan didenifisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Sumardjan (1997) membedakan 4 (empat) pola kemiskinan, yaitu (1) kemiskinan individual, kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seseorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (2) kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang dilihat dengan membandingkan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau rumahtangga di suatu komunitas; (3)

kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang disandang oleh suatu golongan yang "*built in*" atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat; dan (4) kemiskinan budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standard tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yakni nilai pengeluaran konsumsikebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Dalam Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud masyarakat miskin umumnya ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam beberapa hal, yaitu : (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, (2) ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif, (3) ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi, (4) ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatif dan fatalistic, dan (5) ketidakmampuan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa memiliki martabat dan harga diri yang rendah.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap, dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas, dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Chambers inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation* trap atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini sering kali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Dari kelima dimensi diatas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama.

### C. Kemiskinan Perkotaan

Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai kaum miskin kota. Pertama adalah Teori Marjinalitas, sedangkan yang kedua adalah Teori Ketergantungan. Kaum miskin kota, dalam Teori Marjinalitas yang menjelaskan tentang pemukiman kumuh, melihat bahwa kaum miskin sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota. Secara sosial, memiliki ciri-ciri yang mengungkapkan adanya disorganisasi internal dan isolasi eksternal. Secara budaya, mereka mengikuti pola hidup tradisional perdesaan dan terkungkung dalam "budaya kemiskinan". Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak menyerap sumber daya kota daripada menyumbangkannya, boros, konsumtif, cepat puas, tidak berorientasi pasar, tidak berjiwa wiraswata, berproduksi secara pas-pasan. Secara politik, mereka berwatak apatis, tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik revolusioner karena frustrasi, disorganisasi sosial dan ketidakpastian yang mereka alami.

Sebaliknya, dalam Teori Ketergantungan, masyarakat miskin kota tersebut dilihat sebagai pendatang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka adalah bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, pedagang kecil, pemulung sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Secara budaya, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan golongan lain seperti ingin hidup lebih baik, kerja keras, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi, di mata golongan yang berkuasa, mereka dipandang rendah, sumber malapetaka kota seperti kejahatan, pelacuran, dan kekotoran. Secara ekonomis, mereka lebih banyak memberi daripada menerima. Merekalah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota (Sudjatmoko, 2003).

Dengan melihat konteks perkotaan di negara-negara berkembang, jelaslah bahwa Teori Ketergantungan lebih cocok untuk menjelaskan kemiskinan di perkotaan dibandingkan dengan Teori Marjinalitas (Darwis Khudori, 2002). Teori Ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang

yang dimiliki oleh kaum miskin kota berada pada sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara kemiskinan perkotaan yang terjadi dengan sektor informal. Sektor informal sering kali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

#### **D. Hasil Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, maka telah dilakukan penelitian pada 9 kelurahan yang berada di 3 kecamatan. Pemilihan lokasi kelurahan ini berdasar tingginya angka kemiskinan di 3 Kecamatan tersebut, dengan mengambil masing-masing 3 Kelurahan sebagai sample. Kesembilan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Semampir ; Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung
2. Kecamatan Tambaksari : Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah
3. Kecamatan Simokerto : Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang

Sedangkan informan dalam penelitian ini berasal dari aparat kelurahan sebanyak 2 orang tiap kelurahan (total 18 orang), dari masyarakat sebanyak 30 orang tiap kelurahan (total 270 orang), dan dari instansi terkait sebanyak 2 orang per instansi (total 16 orang). Jadi jumlah keseluruhan informan sebanyak 324 orang

#### **D.1. Kebutuhan Kelompok Miskin Untuk Hidup layak di Perkotaan**

Terdapat sejumlah delapan prioritas kebutuhan menurut kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan yaitu : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan, (4) 9 bahan pokok, (5) Air bersih, (6) Kemudahan administrasi, (7) Pelatihan keahlian, (8) Lapangan pekerjaan

**Tabel 4 :**  
**Tabel Kebutuhan Penduduk Miskin Untuk Hidup Layak di Perkotaan**

No	Kelurahan	Kebutuhan Kelompok Miskin
1.	Sidotopo	1. Pendidikan



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Perumahan</li> <li>4. Pelatihan Keahlian</li> <li>5. Air bersih</li> </ol>
2.	Wonokusumo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>4. Lapangan pekerjaan</li> </ol>
3.	Ujung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Perumahan</li> <li>4. Lapangan pekerjaan</li> <li>5. Pelatihan khusus</li> </ol>
4.	Ploso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Air bersih</li> <li>4. Perumahan</li> <li>5. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>6. Lapangan pekerjaan</li> </ol>
5.	Tambaksari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Air bersih</li> <li>4. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>5. Lingkungan dan ketersediaan MCK</li> <li>6. Lapangan Pekerjaan</li> </ol>
6.	Rangkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>4. Lapangan Pekerjaan</li> </ol>
7.	TambakRejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Kemudahan pengurusan administrasi</li> <li>4. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>5. Lapangan Pekerjaan</li> <li>6. Air bersih</li> </ol>
8.	Sidodadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>4. Lapangan Pekerjaan</li> <li>5. Kemudahan pelayanan administrasi</li> </ol>
9.	Simolawang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Kemudahan pengurusan administrasi</li> <li>4. Kebutuhan 9 bahan pokok</li> <li>5. Lapangan Pekerjaan</li> <li>6. Pelatihan Keahlian</li> </ol>

Sumber : Hasil olah data

## **D.2. Program - Program yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan**

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait. Berikut, adalah instansi yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko)
2. Bapemas dan KB
3. Dinas Koperasi dan UMKM
4. Disperindag
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Sosial
8. Dispendik

Semua program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait, semuanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara umum. Dengan demikian tidak ada program khusus yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di sejumlah sembilan kelurahan lokasi penelitian (Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambakrejo, Sidodadi, dan Simolawang) yang secara statistik memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Selain itu terlihat bahwa ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang tumpang tindih / *overlapping* yang dilakukan oleh dua instansi sekaligus. Terdapat sejumlah 3 program yang dalam pelaksanaannya saling tumpang tindih, yaitu :

1. Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin oleh Bapemas dengan Pelatihan Handcraft, Menjahit dan Tata Boga oleh Dinas Sosial. Kedua Program tersebut pada intinya adalah sama, yaitu merupakan pelatihan keterampilan kegiatan seperti menjahit, membuat handcraft dan lain-lain yang sasarannya adalah perempuan atau istri dari keluarga miskin. Dengan pelatihan tersebut diharapkan untuk mendapatkan tambahan pemasukan sehingga perekonomian keluarga tersebut berangsur membaik.
2. PMT atau Bantuan Makanan untuk Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Program Pemberian Snack Lansia oleh Dinas Kesehatan.

Pada dasarnya kedua program ini bertujuan sama yaitu dengan memberi perbaikan gizi pada Lansia. Program ini dapat dikatakan *overlapping* dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dari kedua instansi

3. Pendidikan Lanjutan Siswa Bermasalah Sosial oleh Disnaker dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pondok Sosial Anak Wonorejo oleh Dinsos. *Overlapping* dalam pelaksanaan program ini terjadi karena memang tidak ada koordinasi antara kedua instansi karena kedua instansi memiliki kriteria tersendiri dalam penentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga sasaran dan target dari program ini tergantung masing – masing instansi.

### D.3. Keterkaitan Program-Program Antar Instansi

Berikut adalah tabel yang menunjukkan keterkaitan program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi

**Tabel 5 :**

**Tabel Keterkaitan Program – Program Antar Instansi**

No	Dinas	Dinas Terkait	Koordinasi
1	Bapemas	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Disperindag	Ya
		Dinsos	Tidak
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Dispendik	Ya
2	Dinas Koperasi dan UMKM	Disperindag	Ya
		Dinkes	Ya
		Bapemas	Ya
3	Disperindag	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Bapemas	Ya
4	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Bapemas	Tidak
		Dinkes	Ya
5	Dinas Tenaga Kerja	Dispendik	Tidak
		Bapemas	Tidak
		Dinas Sosial	Tidak
6	Dinas Pendidikan	Bapemas	Ya
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
7	Dinas Kesehatan	Dinas koperasi dan UMKM	Ya
		Dinsos	Ya
8	Bappeko	Bapemas	Ya
		Dinas Koperasi dan	Ya

	UMKM	
	Disperindag	Ya
	Dinas Sosial	Ya
	Dinas Tenaga Kerja	Ya
	Dinas Pendidikan	Ya
	Dinas Kesehatan	Ya

Sumber : hasil olah data

Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua instansi dalam menjalankan programnya selalu memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Namun keterkaitan ini tidak selalu diikuti dengan adanya koordinasi antara instansi tersebut. Bahkan ada beberapa program yang overlapping satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara Bapemas dan Dinas Koperasi dan UMKM. Walaupun beberapa program terlaksana dengan baik dengan adanya koordinasi antara kedua instansi tersebut, namun beberapa program justru berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Di satu sisi Dinas Koperasi dan UMKM sudah melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Skala Mikro-kecil dengan bentuk riil sewa stan. Akan tetapi Bapemas juga masih melaksanakan program yang sama yaitu Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro dengan bentuk yang sama juga dengan menyewakan stan untuk membantu pemasaran hasil usaha skala mikro.

#### **D.4. Program Terpadu Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan**

Berdasar pada prioritas kebutuhan kelompok miskin, maka bisa terbentuk desain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pembuatan desain terpadu tersebut adalah :

1. Melakukan sinkronisasi antara prioritas kebutuhan masyarakat miskin untuk hidup layak di perkotaan dengan berbagai program yang tersedia dari masing-masing instansi
2. Program yang dipilih adalah program yang benar-benar sesuai, dengan demikian beberapa program yang hanya berorientasi project dan tidak signifikan harus dihilangkan
3. Ada beberapa program tambahan yang harus disediakan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebutuhan kelompok masyarakat miskin yang



selama ini belum ada programnya, sehingga dalam desain program terpadu ini harus disediakan program tersebut.

4. Beberapa program yang pelaksanaannya *overlapping* antar instansi harus diambil salah satu yang paling sesuai. Dengan demikian ada beberapa instansi yang akan kehilangan programnya, namun ada beberapa instansi yang justru mendapat tambahan program sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak ada *overlapping* program, maka koordinasi antar instansi akan bisa berjalan dengan baik.

Desain program terpadu antar instansi terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan bisa terlihat jelas dalam tabel berikut :

**Tabel 6 :**  
**Program Terpadu Antar Instansi Terkait**

No	Prioritas Kebutuhan Kelompok Miskin	Program Yang Harus Disediakan	Instansi Terkait
1	Pendidikan	Pemberian beasiswa sekolah	Dispendik
		Penyediaan biaya operasional sekolah	
		Beasiswa sekolah pelayaran	
		Beasiswa sekolah perkapalan	
		Kejar paket ABC	
		Pembinaan SMP dan SMA terbuka	
		Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis	Dinsos
		Pelatihan keterampilan khusus kelompok usia sekolah	Disnaker
		Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus SD	
		Pendidikan Lanjutan Siswa Bermasalah Sosial	
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
		Pelayanan Kesehatan dan	

		Snack Lansia	
		Pencegahan dan Penanggulangan Balita Kurang Gizi, dan Pendampingan Balita Kurang Gizi	
		Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal	
		Pemberantasan nyamuk demam berdarah	
		Khitanan Massal Anak dari Keluarga Tidak Mampu	Dinsos
		Penyediaan dan Pelayanan Alat kontrasepsi bagi Gakin	Bapemas dan KB
3	Perumahan	Bedah rumah / rehabilitasi rumah	Dinas Cipta Karya
		Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah yang sehat (penyediaan dan pembuatan tempat sampah)	Dinsos
		Fasilitasi dan pendampingan pembuatan MCK	Dinkes
4	9 Bahan Pokok	Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)	Bapemas
		Penyediaan bahan makan sehat bagi keluarga miskin (protein telur)	Dinsos
		Penyediaan bahan makan sehat bagi Balita keluarga miskin (protein telur dan susu)	Dinkes
5	Air Bersih	Fasilitasi dan pendampingan lingkungan bersih	Dinkes
		Penyediaan air bersih	PDAM
6	Kemudahan Administrasi	Fasilitasi pengurusan surat pindah maupun KTP	Kecamatan dan Kelurahan
		Fasilitasi pengurusan akte kelahiran	Discapilduk
7	Pelatihan Keahlian	Pemberdayaan keluarga Miskin	Dinsos

		Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	
		Pelatihan handcraft dan Tataboga	Disperindag
		Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna	
		Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin	Bappemas
8	Lapangan Kerja	Pelatihan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha	Disnaker
		Pendampingan dan Pemilihan Bidang Kerja Bagi Calon Lulusan SMA/SMK/MA	
		Bursa Kerja	
		Fasilitasi Pengembangan UMKM	Disperindag
		Pengembangan Kampung Usaha Unggulan	
		Fasilitasi Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru	
		Fasilitasi Pengembangan Komunitas Usaha Skala Mikro dan Kecil	
		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Skala Mikro-kecil (Sewa Stan)	
9	Semua kebutuhan	Perencanaan, Monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan	Bappeko berkoordinasi dengan semua instansi

Sumber : Hasil olah data

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa untuk mendesain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat miskin untuk hidup layak di perkotaan, terdapat sepuluh instansi terkait terkait yaitu :

1. Bapeko
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja

5. Dinas Kesehatan
6. Bapemas dan KB
7. Cipta Karya
8. PDAM
9. Kecamatan dan Kelurahan
10. Catatan Sipil dan Kependudukan

Sedangkan program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan dan koordinasi antar instansi, tanpa ada *overlapping* antar pelaksana program. Berikut adalah sinkronisasi antara kebutuhan kelompok miskin, jumlah program yang disediakan, dan koordinasi antar instansi :

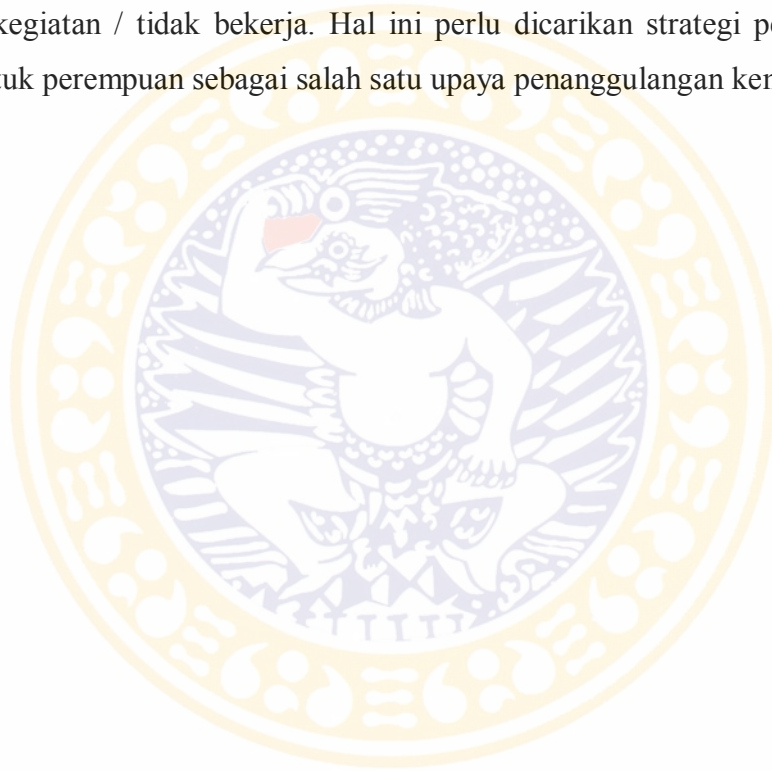
1. Pendidikan ; terdapat 10 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dispendik, Dinsos, dan Disnaker
2. Kesehatan ; terdapat 7 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinkes, Dinsos, Bapemas dan KB
3. Perumahan ; terdapat 3 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Cipta Karya, Dinsos, Dinkes
4. Bahan pokok ; terdapat 3 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Bapemas, Dinsos, Dinkes
5. Air bersih ; terdapat 2 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinkes, PDAM
6. Kemudahan administrasi ; terdapat 2 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Kecamatan dan Kelurahan, Catatan sipil dan Kependudukan
7. Pelatihan keahlian ; terdapat 3 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinsos, Disperindag, dan Bapemas
8. Lapangan pekerjaan ; terdapat 8 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Disnaker dan Disperindag



## E. Penutup

Untuk merealisasikan program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan kesiapan matang dari pelaksana program / instansi terkait. Oleh karena itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi fungsi dan kewenangan masing-masing instansi yang kemudian disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Hal ini untuk menjaring masukan dari pihak instansi terkait, terutama dalam kaitannya dengan penambahan program yang memungkinkan bisa dilaksanakan ataupun penambahan instansi pelaksana.

Selain itu, berdasarkan data lapangan, terlihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dan masih banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan / tidak bekerja. Hal ini perlu dicarikan strategi pemberdayaan khusus untuk perempuan sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan



## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc
- Bintarto, R, Prof, 1993, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Galia Indonesia.
- Kartasamita, 1996, *Pemberdayaan : Pembangunan Berwajah Manusia*, Raja Grafindo Persada
- Khudori, Darwis, 1995, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, PPSK
- Lewis, Oscar 2004 "Kebudayaan Kemiskinan", dalam *Kemiskinan di Perkotaan* (di-edit oleh Parsudi Suparlan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.
- Lipton, Michael ,1977 , *Urbanitation in the Modern World*, London: Faber and Faber.
- Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-Ui Press.
- Prawirakusuma, Soeharto, 2001, *Ekonomi Rakyat*, University Gadjah Mada Press
- Proserpina, D, 2003, *Empowerment & Development*, University of the Philippines Press
- Sudjatmoko, 2003, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Internet :
- [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) (diakses tgl 15 Maret 2012)
- [www.kemiskinankota.com](http://www.kemiskinankota.com) (diakses tgl 15 Maret 2012)
- [http//indos.org.cuhn](http://indos.org.cuhn). (diakses tgl 23 Maret 2012)